

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari program pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan. rencana program. kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Sosial yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah *“Mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera. Maju. dan berdaya Saing”* dimana salah satu prioritas pembangunannya menyebutkan bahwa *“Penanggulangan Kemiskinan dan dan Pengangguran Melalui Konsep Pembangunan “Gerbang Kawentar”* yaitu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan Bagi Warga Kabupaten Blitar maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021 dipandang sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada tahun 2022 nantinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
8. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Sosial yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2016-2021
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

### **1.4. Sistematika Dokumen Renja**

RENJA Kabupaten Blitar Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah.dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang. peraturan pemerintah. peraturan daerah. dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK. kewenangan Perangkat Daerah. serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah. serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM. maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator

yang dikaji. disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD**

Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional/internasional. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. alasan proses tersebut dilakukan. serta temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi. LSM. asosiasi-asosiasi. perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

## **BAB III. TUJUAN. SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud. yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan uraian penjabaran dari tabel program dan kegiatan

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai Peraturan Bupati Blitar No.37 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial/d Tahun 2019 Kabupaten Blitar :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2021 Kabupaten Blitar**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)/3$	$11=(10/4)$
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100%	6 layanan	6 layanan	100%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	46 buah	46 buah	46 buah	46 buah	100%	46 buah	46 buah	100%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100%	9 orang	9 orang	9 orang
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	dan kinerja PD yang disusun tepat waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
	<b>PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial</b>	<b>9.6%</b>	<b>8.1%</b>	<b>9.0</b>	<b>8.168</b>	<b>90.75%</b>	<b>9.3</b>	<b>8.52%</b>	<b>88.78%</b>
	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	Jumlah Tagana Siaga	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
		Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan pemulihan pasca bencana	1.000 orang	0 orang	1.000 orang	500 orang dan 37 orang	53.7%	1.000 orang	512 orang	51.23%
	Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial	<b>Jumlah peserta PBI-N yang diverifikasi</b>	<b>350.000 data</b>	<b>374.061 data</b>	<b>350.000 data</b>	<b>460.000 data</b>	<b>131.43%</b>	<b>350.000 data</b>	<b>394.687 data</b>	<b>112.77%</b>
		Jumlah peserta PBI-D yang diverifikasi	10.000 data							
		Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial	500 orang	376 orang	500 orang	500 orang	100%	500	458.66	91.73%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang dimonitoring	45 keluarga	45 keluarga	45 keluarga	25 keluarga	55.55%	45 keluarga	38 keluarga	85.18%
	Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya	75	75	75	3	4%	75	51	68%
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	28.000 keluarga	52.146 keluarga	28.000 keluarga	52.146 keluarga	186.24%	52.146 keluarga	52.146 keluarga	157.49%
		Jumlah keluarga penerima sasaran PKH yang dibina	1.000 keluarga	2.160 keluarga	1.000 keluarga	1.000 keluarga	100%	1.000 keluarga	1.386 keluarga	138.66%
	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial</b>	<b>29%</b>	<b>26%</b>	<b>33%</b>	<b>119.92%</b>	<b>363.39%</b>	<b>37%</b>	<b>60.97%</b>	<b>210.25%</b>
	Fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan	15 orang	15 orang	15 orang	45 orang	300%	15 orang	25 orang	166.67%
		Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi	400 orang	20 orang	400 orang	260 orang	65%	400 orang	226 orang	56.66%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi	500 orang	500 orang	500 orang	255 orang	51%	500	418 orang	83.66%
	Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial	Jumlah pasien psikotik dan AN-ABH yang direhabilitasi ke UPT, RSBL dan UPT PRSMP	150 orang	4 orang	150 orang	18 orang	12%	150 orang	57 orang	38.22%
		Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng	200 orang	0 orang	200 orang	242 orang	121%	200	147 orang	73.66%
		Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga	400 orang	400 orang	400 orang	242 orang	60.5%	400 orang	347 orang	86.83%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Penghuni Panti (LKSA)	Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.709 orang	170.9%	1.000 orang	1.236 orang	123.63%
		Jumlah masyarakat lanjut usia yang dibantu dan ditangani	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.423 orang	142.3%	1.000 orang	1.141 orang	114.1%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Persentase fakir miskin yang dibantu dan ditangani</b>	<b>1.12%</b>	<b>0.95%</b>	<b>1.1%</b>	<b>0.98%</b>	<b>89.09%</b>	<b>1.11%</b>	<b>1.01%</b>	<b>90.47%</b>

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin	Persentase pemutakhiran BDT-PPFK	100%	80%	100%	44.79%	44.79%	100%	74.93%	74.93%
	Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial	Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan	150 orang	0 orang	150 orang	250 orang	166.66%	150 orang	133 orang	88.88%
		Jumlah perangkat desa/kelurahan. toga. tomas yang diberi penyuluhan	744 orang	744 orang	744 orang	110 orang	14.78%	744 orang	532 orang	71.59%
	Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin	Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100%	500 orang	500 orang	100%
		Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>IKM Pelayanan kelembagaan sosial</b>	Baik (62.51-81.25)	<b>90</b>	Baik (62.51-81.25)	<b>93.68</b>	<b>97%</b>	Baik (62.51-81.25)	<b>94.56</b>	94.56
	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapat pembinaan	700 orang	700 orang	700 orang	518 orang	74%	700 orang	639 orang	91.33%
	Fasilitasi peningkatan kinerja LK3	Persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	100 orang	43 orang	100 orang	43 orang	42%	100 orang	61 orang	61.66%
		Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting	500 orang	360 orang	500 orang	200 orang	40%	500 orang	353 orang	70.66%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial								
	Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	32 orang	28 orang	32 orang	27 orang	84.37%	32 orang	27 orang	84.37%

### **2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

#### **A. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial**

##### **1) Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama TAGANA dalam kesiap siagaan bencana. Sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yaitu terkait dengan upaya membantu masyarakat korban bencana agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosial tersebut terkait kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu membantu kebutuhan pangan, melalui kegiatan pendirian Dapur Umum. Sedangkan untuk pemenuhan fungsi tempat tinggal maka Dinas Sosial mendirikan tenda darurat. Selain memenuhi kedua fungsi tersebut, Dinas Sosial memiliki tugas yaitu memberikan layanan untuk pemulihan kondisi psikologi bagi korban bencana. Untuk jumlah realisasi korban bencana yang mendapat bantuan hanya terealisasi sebesar 53.70%. Hal ini dikarenakan hanya banjir di Sutojayan pada bulan Februari tahun 2019 dengan skala kecil sehingga tidak banyak korban yang membutuhkan bantuan makan melalui dapur umum. Selain itu Karena bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2019 hanya terjadi dalam skala kecil (Kebakaran Rumah dan Rumah roboh) serta tidak adanya laporan dari Desa/ Kelurahan terkait adanya bencana yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga Dinas Sosial tidak memberikan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar

##### **2) Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan pengawasan terhadap penyelenggara undian berhadiah dan sumber dana sosial lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan undian berhadiah yang dilakukan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab. Harapannya, dengan mengawasi pelaksanaan undian berhadiah dengan ketat, maka dapat memperkecil peluang masyarakat mengalami penipuan. Hal ini dikarenakan korban penipuan seringkali jatuh miskin dan menambah jumlah PMKS di kabupaten Blitar. Untuk jumlah realisasi pelaksana undian berhadiah yang menjadi sasaran kegiatan hanya terealisasi sebesar 4% karena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

## **B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

### **1) Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma**

Merupakan kegiatan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk merehabilitasi (Memberikan Bantuan Pelatihan) ke UPT sesuai dengan kecacatannya. Sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yaitu terkait dengan upaya pemberdayaan penyandang Disabilitas sesuai dengan kecacatannya sehingga nantinya dapat mandiri dan mencukupi kehidupannya sendiri. Untuk realisasi yang tidak mencapai target, yaitu hanya sebesar 65% dan 51% karena menyesuaikan kemampuan pagu anggaran yang dimiliki oleh APBD.

Kegiatan fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan ODK agar mampu memenuhi fungsi sosialnya (pangan, papan, pendidikan, kesehatan). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satu wujud kegiatannya yaitu memberikan pelatihan kepada ODK agar memiliki keterampilan lebih yang bernilai ekonomis. Harapannya dengan demikian maka ODK mampu berkarya yang memiliki nilai jual, maka kondisi perekonomiannya akan membaik dan mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Akan tetapi, ODK memiliki banyak keterbatasan fisik dan mental yang menyebabkan proses pelatihannya berjalan lambat, dan tidak banyak variasi keterampilan yang bisa diajarkan. Selain itu, produk maupun jasa yang disediakan oleh ODK kurang diminati oleh masyarakat

karena harga yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk dan jasa yang disediakan oleh mesin pabrik maupun orang sehat pada umumnya.

**Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:** dibuatkan wadah khusus. organisasi tersendiri yang secara spesifik mengelola pelatihan ODK yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terjadinya transaksi keuangan. Organisasi tersebut sudah ada. yaitu Harapan Mulya di Resapombo dengan produknya yaitu Batik Ciprat.

**2) Fasilitasi. pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial**

Wujud dari kegiatan ini yaitu berupa pendampingan dan mobilisasi pasien psikotik dan terlantar ke UPT yang berwenang dalam penanganan pasien psikotik. Pada umumnya ke RSBL yang ada di daerah lain milik pemerintah provinsi. Untuk realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan target disebabkan oleh kondisi nyata di lapangan. Jadi memang tidak banyak pasien psikotik yang terlantar di tahun 2019 sehingga yang di tangani juga tidak banyak sebagaimana target yang telah di tetapkan sebelumnya pada dokumen perencanaan.

**C. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**

**1) Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin**

Kegiatan pemutakhiran BDT PPFM memiliki tujuan untuk meningkatkan ketepatan distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan melakukan pemutakhiran data. maka keakuratan data calon penerima manfaat akan semakin tinggi sehingga mampu mencegah terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan. Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada satu

operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Selain itu, operator desa dibantu oleh dua orang tenaga bantu yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Akan tetapi, tenaga dari 248 desa/kelurahan yang ada di kabupaten Blitar kondisinya beragam. Masih terdapat SDM yang tua sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SIKS-NG. Selain terbatasnya SDM, terdapat keterbatasan sarana komputer sehingga menyulitkan proses pengisian aplikasi. Tidak hanya itu, seringkali operator desa mendapatkan banyak tugas dari pimpinan sehingga kesulitan waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Terakhir masih terdapat kepala desa/kelurahan yang belum memahami peran penting tenaga desa sebagai ujung tombak pemutakhiran data masyarakat fakir miskin sehingga tugas tersebut diabaikan.

Kegiatan pemutakhiran BDT PPFM memiliki tujuan untuk meningkatkan ketepatan distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan melakukan pemutakhiran data, maka keakuratan data calon penerima manfaat akan semakin tinggi sehingga mampu mencegah terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan. Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada satu operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Selain itu, operator desa dibantu oleh dua orang tenaga bantu yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Akan tetapi, tenaga dari 248 desa/kelurahan yang ada di kabupaten Blitar kondisinya beragam. Masih terdapat SDM yang tua sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SIKS-NG. Selain terbatasnya SDM, terdapat keterbatasan sarana komputer sehingga menyulitkan proses pengisian aplikasi. Tidak hanya itu, seringkali operator desa mendapatkan banyak tugas dari pimpinan sehingga kesulitan waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Terakhir masih terdapat kepala desa/kelurahan yang belum memahami

peran penting tenaga desa sebagai ujung tombak pemutakhiran data masyarakat fakir miskin sehingga tugas tersebut diabaikan.

**Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:** terus dilakukan kunjungan ke 248 desa/kelurahan yang ada di seluruh wilayah kabupaten Blitar untuk memantau progres perkembangan proses verifikasi dan validasi data oleh petugas di desa. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ke kepala desa/kelurahan untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemutakhiran basis data keluarga fakir miskin. Di sisi lain, terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi petugas-petugas lapangan yang mengalami kesulitan dalam proses input data di lapangan. Langkah nyata yang dilakukan yaitu menambah petugas di Dinas Sosial, melakukan peningkatan kualitas komputer dan perbaikan jaringan internet sehingga bisa mengakses aplikasi SIKS-NG dengan lebih baik.

#### **D. Program Pemberdayaan Sosial**

##### **1) Fasilitasi peningkatan kinerja LK3**

LK3 merupakan kegiatan dari Dinas Sosial yang dilakukan dengan cara memberikan pendampingan kepada keluarga rentan masalah sosial, yang sedang mengalami masalah internal, salah satunya terancam perceraian. Perceraian bisa menimbulkan banyak masalah, salah satunya yaitu munculnya orang miskin baru. Misalnya, seorang suami pekerja bercerai dengan istri yang tidak biasa bekerja. Maka pasca perceraian si istri akan rawan menjadi wanita rentan ekonomi sehingga menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, Dinas sosial bersama dengan beberapa petugas memberikan pendampingan, mediasi sehingga diharapkan dapat membantu pengurangan nilai PMKS khususnya dalam hal permasalahan yang timbul dari permasalahan keluarga. Untuk jumlah realisasi penanganan keluarga rentan masalah ekonomi, tidak terjadi 100%. Dari target 50 keluarga hanya terealisasi sebanyak 42 keluarga. Hal ini terjadi

karena keluarga yang melaporkan kasusnya. tiba-tiba membatalkan aduan sehingga tidak jadi diberikan pendampingan dan penanganan lebih lanjut.

## **2) Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan**

Pemberdayaan veteran dilakukan dengan cara memberikan bantuan bagi janda veteran perang yang dalam kondisi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Kegiatan peningkatan kesejahteraan perintis dan janda perintis kemerdekaan dilakukan dengan cara memberikan bantuan sembako melalui APBD yang diserahkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Bantuan tersebut diserahkan dengan cara diantar ke rumah perintis dan janda perintis secara langsung karena sudah lanjut usia. Kerjasama dilakukan dengan pihak ketiga sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan sembako. Untuk realisasi kegiatan ini tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, yaitu hanya sebesar 84.38% dikarenakan sebagian janda veteran telah meninggal dunia di tahun pelaksanaan kegiatan.

### **2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

#### **A. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**

##### **1) Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan pendampingan persiapan kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE diberikan kepada kelompok masyarakat fakir miskin sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga fakir miskin sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Pendampingan dilakukan agar masyarakat fakir miskin siap dalam mengelola bantuan KUBE yang diberikan oleh pemerintah pusat.

#### **B. Program Pemberdayaan Sosial**

### **1) Peningkatan kualitas kelembagaan sosial**

Merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka memperkuat kelembagaan sosial untuk meningkatkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Bentuk kegiatannya yaitu pelatihan las dan jambore dengan peserta dari karang taruna yang berasal dari 248 desa/kel. dan 22 kecamatan. Dengan diadakanya kegiatan Pelatihan Las dan Jambore Karang Taruna yang merupakan program kegiatan dari Dinas Sosial diharapkan karang taruna di wilayah kabupaten blitar dapat saling kerkoordinasi dan membantu satu sama lain dalam hal pengurangan nilai PMKS khususnya di usia remaja.

### **2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

#### **A. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial**

### **1) Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan jaminan kesehatan yang diberi nama PBI-JK (Peserta Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan). PBI-JK dibagi menjadi dua, yaitu: (1) PBIN (Peserta Bantuan Iuran Nasional) yang dianggarkan melalui dana APBN; dan (2) PBID (Peserta Bantuan Iuran Daerah) yang dianggarkan melalui dana APBD II. Masyarakat fakir miskin jumlahnya sangat banyak (460.000 orang). sementara kuota PBIN sifatnya terbatas (hanya 350.000 kuota) sehingga tidak bisa membiayai jaminan sosial seluruh masyarakat fakir miskin yang ada di kabupaten blitar. Oleh karena itu pemerintah daerah membuat inisiatif untuk memberikan jaminan kesehatan yang sama dengan PBIN. Dibiayai oleh APBD dengan fasilitas yang setara dengan yang dibiayai oleh APBN. Jaminan sosial tersebut kemudian disebut dengan PBID.

Permasalahan terkait pemutakhiran data yaitu jumlah data yang selalu bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat

yang selalu dinamis. berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Perubahan data meliputi pengurangan data dan penambahan data. Data bisa berkurang disebabkan oleh: meninggal; sudah mampu; data ganda; dan data tidak ditemukan. Data bisa bertambah disebabkan oleh: usulan baru dan kelahiran. Contoh kejadian untuk kelahiran misalnya adalah karena ibu hamil kemudian melahirkan sehingga anaknya otomatis juga miskin dan menambah jumlah data. Data yang semakin banyak menyebabkan realisasi kegiatan dalam melakukan verifikasi dan validasi data semakin lama semakin banyak.

**Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:** dibuatkan inovasi baru berupa aplikasi untuk mempercepat pelaksanaan pemutakhiran data. Dengan adanya aplikasi tersebut. proses input data dapat dilakukan secara on-line. terhubung langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga memangkas proses panjang pengiriman data.

## 2) **Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)**

Program keluarga harapan merupakan program yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial. Dana program keluarga harapan bersumber dari APBN. langsung disalurkan oleh pusat kepada penerima manfaat yang ada di daerah. Adapun peran Dinas Sosial di daerah yaitu sebagai fasilitasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Fasilitasi berarti mempermudah dalam pelaksanaan PKH. Fasilitasi yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pendamping PKH yang ada di daerah. kemudian memfasilitasi pada saat rapat dan koordinasi lainnya. mengawal distribusi bantuan PKH serta melakukan pengawasan dan sinkronisasi data penerima bantuan PKH bersama data penerima BPNT. Selain itu. bentuk kegiatan lain dalam program keluarga harapan yaitu upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat penerima PKH yang telah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan sudah lebih sejahtera dari

kondisi di tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan keluarga tersebut dengan sukarela dan sadar mau mengundurkan diri dari PKH sehingga bantuan yang selama ini disalurkan kepada orang tersebut, dapat disalurkan kepada masyarakat lain yang kondisinya lebih membutuhkan. Untuk jumlah realisasi fasilitasi PKH terlaksana sebanyak 186.24%. Hal ini terjadi karena jumlah data usulan yang terus dimasukkan seiring dengan jumlah masyarakat miskin yang ingin dibantu semakin banyak.

## **B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

### **1) Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma**

Merupakan kegiatan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk merehabilitasi (Memberikan Bantuan Pelatihan) ke UPT sesuai dengan kecacatannya. Sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yaitu terkait dengan upaya pemberdayaan penyandang Disabilitas sesuai dengan kecacatannya sehingga nantinya dapat mandiri dan mencukupi kehidupannya sendiri. Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan keterampilan sehingga ODK memiliki keterampilan lebih untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis. Untuk realisasi yang mencapai 300% dari target, hal ini terjadi karena pelatihan dilaksanakan hingga beberapa kali sesuai jumlah ODK yang berpotensi untuk diberi pelatihan.

### **2) Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia**

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti dilakukan dengan pemberian bantuan permakanan kepada anak dan lansia penghuni panti. Realisasi dari kegiatan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena jumlah anak dan lansia penghuni panti lebih banyak dari target yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan. Hal

ini sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Masih adanya beberapa panti anak dan lansia yang belum memiliki surat legalitas serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh pengurus panti menyebabkan pengelolaan panti anak dan lansia berjalan dengan kurang profesional. Oleh karena itu beragam pelatihan terus diberikan kepada pengurus panti agar memiliki keterampilan yang lebih dalam mengelola panti. Bantuan permakanan dan uang saku diberikan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak dan lansia penghuni panti sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan lebih baik.

**Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:** terus dilakukan pembinaan dan pendampingan pengurus panti agar memiliki semangat maju dan mengurus legalitas pantinya. Selain itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan manajemen panti.

### **C. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**

#### **1) Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat fakir miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan ada dua, yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat fakir miskin, atau dengan cara mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup keluarga fakir miskin. Pemberian bantuan pangan non tunai dilakukan sebagai strategi dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di kabupaten Blitar.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase PMKS yang ditangani	n/a	2,61	5	5	5	5	9.30	n/a	n/a	n/a	-
2	Persentase PMKS yang diberi bantuan	n/a	94,9	5	5	5	5	4.83	n/a	n/a	n/a	-
3	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	n/a	24	20	20	20	20	20	n/a	n/a	n/a	-

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Sosial pada tingkat pemerintah provinsi. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya. jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari isu- isu strategis yang ada. dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Tingginya jumlah PMKS.
- 2) Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PMKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun.
- 3) Rendahnya keterampilan PMKS. serta rendahnya kesadaran PMKS saat akan diberi pelatihan keterampilan.
- 4) Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.

- 5) Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun yang mengakibatkan hilangnya harta benda yang dimiliki korban bencana.
- 6) Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam di Blitar selatan.
- 7) Kurangnya sarana sosial/ penampungan sementara/ rumah singgah/ tempat rehabilitasi PMKS.
- 8) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS.
- 9) Rendahnya kualitas dan kuantitas PSKS (Rekan Dinas Sosial) dalam penanganan PMKS.
- 10) Adanya mental yang salah, yaitu mental suka diberi bantuan pada diri sebagian besar PMKS.
- 11) Rendahnya akses informasi dan pelayanan pemerintah yang dapat dijangkau oleh PMKS karena keterbatasan teknologi yang dimiliki.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar terdapat 4 (empat) Program / Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, yaitu:

1. Program Program Bantuan dan Perlindungan Sosial;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
3. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
4. Program Pemberdayaan Sosial.

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar maka pada tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021 dimana didalamnya terdapat 8 (Delapan) program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					RENJA 2020	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Persentase Kepuasan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>749.321.200</b>	
						Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	6	749.321.200	
						<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>570.233.200</b>	
						Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Sosial	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	168	570.233.200	
						<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>14.475.000</b>	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun	3	7.125.000	
						Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun	6	7.350.000	
						<b>PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL</b>		<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.144.586.000</b>	
						Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	Kab. Blitar	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan pemulihan pasca bencana	1000	334.180.000	
							Kab. Blitar	Jumlah TAGANA siaga	60		
						Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Kab. Blitar	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial	75	77.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya			
						Pemutakhiran Data dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial	Kab. Blitar	Jumlah peserta PBI-N dan PBI-D yang diverifikasi	402.000	479.431.000	
								Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial	500		
						Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Kab. Blitar	Jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	51.000	253.850.000	
								Jumlah keluarga penerima sasaran PKH yang dibina	1.000		
						<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial</b>	<b>37</b>	<b>1.479.294.000</b>	
						Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Kab. Blitar	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan	15	369.920.000	
								Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi	400		
								Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi	500		
						Fasilitasi, Pembinaan dan Penanganan Penyandang Tuna Sosial	Kab. Blitar	Jumlah pasien psikotik dan AN-ABH yang direhabilitasi ke UPT RSBL dan UPT PRSMP	150	210.239.000	
								Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS, anjal terlantar dan gepeng	200		
								Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban pasung, psikotik berbasis keluarga	400		
						Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Penghuni Panti Anak dan Lansia	Kab. Blitar	Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	1.000	899.135.000	
								Jumlah masyarakat lanjut usia yang dibantu dan ditangani	1.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	Kab.Bi tar	Persentase fakir miskin yang dibantu dan ditangani	1.11	1.629.378.000	
						Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Kab.Bli tar	Persentase pemutakhiran BDT-PPFK	100%	972.933.000	
						Fasilitasi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Sosial	Kab.Bli tar	Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan	370	267.435.000	
								Jumlah perangkat desa/kel. TOGA. TOMAS yang dibina dan diberi penyuluhan	524		
						Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin	Kab.Bli tar	Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	700	389.010.000	
								Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan	150		
						<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kab.Bli tar	<b>IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial</b>	<b>Baik</b>	<b>636.903.600</b>	
						Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sosial	Kab.Bli tar	Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapatkan pembinaan	300	295.820.000	
						Fasilitasi Peningkatan Kinerja LK3	Kab.Bli tar	Persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	100	150.575.000	
								Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	500		
						Pemberdayaan Veteran dan Perintis Kemerdekaan	Kab.Bli tar	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	32	190.508.600	
						<b>TOTAL</b>				<b>6.224.191.000</b>	

Sumber: Dinas Sosial 2020

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non fisik. Pada saat penyusunan RENJA 2021 ini maka hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) belum diputuskan sehingga data usulan program dan kegiatan masyarakat tidak bisa ditampilkan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia memiliki visi (2015-2019) adalah “Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kemanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 (Sembilan) agenda prioritas pemerintah (Nawacita) meliputi:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan di Kabupaten Blitar yaitu kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Untuk mewujudkan visi kabupaten Blitar maka misi pembangunan kabupaten Blitar tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 6 (enam) poin utama dimana salah satunya dan menjadi yang teratas adalah : meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan sosial baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2020, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan sosial di Kabupaten Blitar dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu acuan bagi penyusunan renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan agar program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tetap linier dengan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/kegiatan yang disusun oleh Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/kegiatan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam Renstra Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa salah satu isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan Kabupaten Blitar salah satunya adalah : kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Berdasarkan prioritas tersebut maka Dinas Sosial telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Sosial di Kabupaten Blitar antara lain :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Blitar Tahun 2018 – 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-			
				2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	8,7	9,0	9,3	9,6
		Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20%	20%	20%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama hingga tahun ke ketiga, pembangunan tahun 2021 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama hingga tahun ketiga. Pada tahun 2021, Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan strategi : meningkatkan pembinaan bagi PMKS. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat 8 Program dan 18 Kegiatan pendukung.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Sosial Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2021 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Sosial berdasarkan Arah kebijakan tahun 2021 dalam RPJMD adalah meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan strategi meningkatkan pembinaan bagi PMKS. Untuk mencapai sasaran tersebut, 4 (empat) program Dinas Sosial tahun 2021 yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, serta Program Pemberdayaan Sosial merupakan program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama hingga tahun ketiga, pembangunan tahun 2018 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama dan kedua. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat 8 Program dan 18 Kegiatan pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Sosial Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Kepuasan Aparatur</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>304.738.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>304.738.000</b>
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Dinas Sosial	6 jenis layanan	304.738.000	APBD		6 jenis layanan	304.738.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>231.905.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>231.905.000</b>
	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	Dinas Sosial	46 buah	231.905.000	APBD		46 buah	231.905.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>0</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Dinas Sosial	0	0	APBD		0	0
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang disusun tepat waktu</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>5.887.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>5.887.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun	Dinas Sosial	3 Dokumen	2.000.000	APBD		3 Dokumen	2.000.000
	Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun	Dinas Sosial	6 Dokumen	3.887.000	APBD		6 Dokumen	3.887.000
	<b>PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>10 %</b>	<b>13.846.024.000</b>			<b>10 %</b>	<b>13.846.024.000</b>
	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	Jumlah Tagana Siaga	Kab. Blitar	40 orang	13.846.024.000	APBD		40 orang	13.846.024.000
		Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan pemulihan pasca bencana		1.000 Orang dan 178 paket				1.000 Orang dan 178 paket	
	Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial	Jumlah peserta PBI-N dan PBI-D yang diverifikasi	Kab.Blitar	450.000 orang dan 50.000 orang	0	APBD		450.000 orang dan 50.000 orang	0
		Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial		45 orang				45 orang	
		Jumlah keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang dimonitoring		800 keluarga				800 keluarga	
	Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaannya	Kab. Blitar	75 orang	0	APBD		75 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Kab.Blitar	28.000 Keluarga	0	APBD		28.000 Keluarga	0
		Jumlah keluarga penerima sasaran PKH yang dibina		0 keluarga				0 keluarga	
	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>5%</b>	<b>2.059.082.000</b>	<b>APBD</b>		<b>5%</b>	<b>2.059.082.000</b>
	Fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan	Kab.Blitar	15 orang	75.000.000	APBD		15 orang	75.000.000
		Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi		400 orang				400 orang	
		Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi		500 orang				500 orang	
	Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial	Jumlah pasien psikotik dan AN-ABH yang direhabilitasi ke UPT. RSBL dan UPT PRSMP	Kab.Blitar	150 orang	0	APBD		150 orang	0
		Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS. anjal. terlantar dan gepeng		200 orang				200 orang	
		Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban		400 orang				400 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pasung psikotik berbasis keluarga							
	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Penghuni Panti (LKSA)	Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	Kab.Blitar	1000 anak	1.984.082.000	APBD		1000 anak	1.984.082.000
		Jumlah masyarakat lanjut usia yang dibantu dan ditangani		1.000 orang				1.000 orang	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Persentase fakir miskin yang dibantu dan ditangani</b>	<b>Kab.Bitara</b>	<b>85 %</b>	<b>2.120.119.000</b>	<b>APBD</b>		<b>85 %</b>	<b>2.120.119.000</b>
	Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin	Persentase pemutakhiran BDT-PPFK	Kab.Blitar	100 %	100.000.000	APBD		100 %	100.000.000
	Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial	Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan	Kab.Blitar	150 orang	1.840.119.000	APBD		150 orang	1.840.119.000
		Jumlah perangkat desa/kelurahan, toga, tomas yang diberi penyuluhan		744 orang				744 orang	
	Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin	Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab.Blitar	700 orang	180.000.000	APBD		700 orang	180.000.000
		Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan		150 orang				150 orang	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>IKM Pelayanan kelembagaan sosial</b>	<b>Kab.Blitar</b>	<b>Baik</b>	<b>1.716.495.000</b>	<b>APBD</b>		<b>Baik</b>	<b>1.716.495.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapat pembinaan	Kab.Blitar	700 orang	1.597.495.000	APBD		700 orang	1.597.495.000
	Fasilitasi peningkatan kinerja LK3	Persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	Kab.Blitar	100 %	50.000.000	APBD		100 %	50.000.000
		Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial		500 orang				500 orang	
	Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	Kab.Blitar	26 orang	69.000.000	APBD	Setiap tahun jumlahnya semakin sedikit karena meninggal	26 orang	69.000.000
	<b>TOTAL</b>				<b>20.284.250.000</b>				<b>20.284.250.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Sosial, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2021 diharapkan dapat dilaksanakan dengan paradigma baru. Dimana selama ini masih menggunakan paradigma lama yaitu dengan pendekatan kelayakan sebagai penyandang masalah, sehingga orientasinya pada pemecahan masalah (problem solving) . Sebagai konsekuensinya peran pemerintah lebih dominan melalui langkah rehabilitative, penyantunan, pemberian bantuan dan lain-lain. Dalam jangka panjang ternyata paradig ini menciptakan sikap malas dan ketergantungan yang tinggi.

Sementara itu paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah *Employment Community For Development*, artinya memandang Penyandang Masalah Sosial dari segi potensi dan kemampuan internalnya. Dimana paradigma ini tidak memandang tidak melihat kelayakan sebagai orang bermasalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan potensi melalui kegiatan pemberdayaan. Dengan paradigma ini diharapkan tumbuh sikap dan perilaku kemandirian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial kedepan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Komitmen yang tinggi atas dasar keterpanggilan dan rasa kesetiakawanan sosial perlu tetap ditumbuhkan di kalangan para pelaku usaha kesejahteraan sosial baik dari birokrat maupun masyarakat.
2. Prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan atau memanusiakan manusia harus tetap terjaga dan terpelihara dalam rangka pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
5. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
6. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja tahun 2021 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan strategi meningkatkan pembangunan bagi PMKS.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Blitar

**ROMELAN, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620101 198803 1 028